

LITERASI DIGITAL SEBAGAI STRATEGI MEREDAM KONFLIK SARA

Rifki Dwi Naufal¹, Nurmala Dwi Winata², Ratu Syiva Ulayya³, Diki Jamaluddin Ikhsan⁴, Ratna Sari Dewi⁵

rdwinaufal@gmail.com¹, skyxunaae@gmail.com², syivaulayya@gmail.com³,
allyyux0@gmail.com⁴, ratna@untirta.ac.id⁵

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam peran literasi digital sebagai strategi untuk menekan konflik berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di ruang digital. Dalam konteks Indonesia, konflik SARA kerap dipicu dan diperburuk oleh maraknya disinformasi, ujaran kebencian, serta pembingkai narasi media yang tidak berimbang. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kritis, penelitian ini menelaah hubungan antara rendahnya tingkat literasi digital dan meningkatnya eskalasi konflik sosial di media sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi digital tidak terbatas pada kemampuan teknis dalam mengakses dan menggunakan informasi, tetapi juga mencakup aspek berpikir kritis, kesadaran etis, serta pemahaman kewarganegaraan digital. Penguatan literasi digital berkontribusi pada meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi, mengelola emosi saat berinteraksi di ruang daring, serta menumbuhkan sikap toleran dalam kehidupan multikultural. Oleh karena itu, literasi digital dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan mencegah polarisasi berbasis identitas di era digital.

Kata Kunci: Literasi Digital, Konflik SARA, Disinformasi, Media Sosial, Ketahanan Sosial.

ABSTRACT

This study aims to examine in depth the role of digital literacy as a strategy to reduce conflicts based on ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA) in the digital space. In the Indonesian context, SARA conflicts are often triggered and exacerbated by rampant disinformation, hate speech, and unbalanced media narratives. Through a qualitative approach using literature study and critical analysis methods, this study examines the relationship between low levels of digital literacy and the escalation of social conflicts on social media. The findings show that digital literacy is not limited to the technical ability to access and use information, but also includes critical thinking, ethical awareness, and an understanding of digital citizenship. Strengthening digital literacy contributes to increasing the community's ability to verify information, manage emotions when interacting in online spaces, and foster tolerance in multicultural life. Therefore, digital literacy can be seen as a strategic instrument in strengthening social resilience and preventing identity-based polarization in the digital age.

Keywords: Digital Literacy, SARA Conflict, Disinformation, SocialMedia, Social Resilience.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang menjadi identitas sekaligus kekuatan bangsa. Keragaman tersebut merupakan kekayaan sosial yang memperkaya dinamika kehidupan berbangsa. Namun, di sisi lain, pluralitas juga menyimpan potensi gesekan apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Memasuki era digital, perkembangan teknologi komunikasi menghadirkan ruang interaksi baru yang melampaui batas geografis dan waktu. Media sosial

memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam produksi dan distribusi informasi, tetapi sekaligus membuka peluang terjadinya eskalasi konflik berbasis identitas.

Konflik SARA di Indonesia mengalami pergeseran pola seiring berkembangnya ruang digital. Jika pada masa sebelumnya konflik lebih banyak berlangsung secara langsung dalam ruang fisik, kini perdebatan dan pertentangan lebih sering terjadi di media sosial dengan intensitas penyebaran yang jauh lebih cepat dan luas. Informasi yang bermuatan hoaks, ujaran kebencian, serta pembingkaian (*framing*) yang bias dapat dengan mudah menyebar dan memperkuat polarisasi sosial. Bahkan, konflik yang semula bersifat lokal dapat berkembang menjadi isu nasional dalam waktu singkat karena sifat media digital yang masif dan simultan.

Najib, Maftuh, dan Malihah (2023) menjelaskan bahwa media sosial memiliki karakter ambivalen. Di satu sisi, platform digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana mempererat persatuan melalui penyebaran pesan edukatif dan nilai-nilai kebangsaan. Namun di sisi lain, media sosial juga berpotensi menjadi medium disintegrasi ketika digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan ujaran kebencian. Penyalahgunaan ruang digital inilah yang kerap memicu ketegangan sosial dan memperuncing konflik identitas.

Selain itu, karakter komunikasi digital yang bersifat atemporal turut memperpanjang usia suatu wacana konflik. Konten yang telah dipublikasikan tidak pernah benar-benar hilang, melainkan dapat diakses, dibagikan ulang, serta ditafsirkan kembali dalam konteks sosial yang berbeda. Fakhri (2025) menegaskan bahwa sifat atemporalitas media digital memungkinkan narasi konflik terus hidup dan direproduksi lintas waktu, sehingga potensi provokasi tetap terbuka dan dapat memunculkan ketegangan baru.

Dalam konteks tersebut, rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor penting yang memperparah situasi. Banyak pengguna media digital menerima dan menyebarkan informasi tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Ketidakmampuan memahami konteks, membaca kepentingan politik di balik suatu pesan, serta mengendalikan emosi dalam interaksi daring semakin memperbesar risiko disintegrasi sosial. Oleh karena itu, literasi digital tidak dapat dipahami sekadar sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi harus dimaknai sebagai kompetensi kritis, etis, dan reflektif dalam bermedia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, literasi digital perlu diposisikan sebagai strategi preventif sekaligus transformatif dalam meredam konflik berbasis SARA. Melalui penguatan kemampuan berpikir kritis, kesadaran etika, dan pemahaman multikultural, masyarakat diharapkan mampu membangun ruang digital yang lebih inklusif, dialogis, dan berorientasi pada kohesi sosial. Dengan demikian, literasi digital menjadi instrumen strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah kompleksitas dinamika komunikasi era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menelaah secara sistematis berbagai kajian terkait literasi digital dan konflik SARA. Proses diawali dengan perumusan fokus dan pertanyaan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran lima jurnal nasional terakreditasi yang relevan. Artikel yang terpilih diseleksi berdasarkan kesesuaian tema dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi guna menemukan pola, kecenderungan, serta strategi yang ditawarkan dalam penelitian sebelumnya. Data bersumber dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen akademik mengenai literasi digital, konflik SARA, serta dinamika media sosial di Indonesia. Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil

antarjurnal. Analisis difokuskan pada hubungan antara rendahnya literasi digital dan meningkatnya eskalasi konflik, yang kemudian menjadi dasar perumusan strategi konseptual berbasis penguatan literasi digital sebagai upaya meredam konflik berbasis identitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa konflik SARA di ruang digital tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dalam ekosistem media sosial. Fenomena echo chamber, menguatnya polarisasi identitas, serta rendahnya budaya verifikasi informasi menjadi pemicu utama munculnya ketegangan berbasis identitas. Najib et al. (2023) menyoroti pentingnya penerapan strategi 5D2C sebagai pedoman bermedia sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, penelitian yang dipresentasikan dalam prosiding EAI Conference(2023) menunjukkan bahwa transformasi komunikasi digital mempercepat penyebaran framing identitas yang sarat muatan emosi kolektif, sehingga memperbesar potensi konflik. Sementara itu, artikel pada jurnal pendidikan kewarganegaraan (526-2564-1-PB) menegaskan bahwa literasi digital perlu diintegrasikan dengan pendidikan karakter guna mencegah berkembangnya radikalisme di ruang siber.

Berdasarkan kelima sumber yang dianalisis, literasi digital dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi utama. Pertama, dimensi kognitif yang berkaitan dengan kemampuan memverifikasi informasi dan berpikir kritis. Kedua, dimensi etis yang menekankan kesadaran akan tanggung jawab serta etika dalam komunikasi digital. Ketiga, dimensi sosial yang berorientasi pada penguatan toleransi dan dialog lintas identitas.

Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa konflik SARA di ruang digital dipicu oleh disinformasi, mediatisasi konflik yang berlebihan, serta lemahnya literasi kewarganegaraan digital. Informasi provokatif kerap dikemas secara ideologis untuk membangkitkan sentimen kelompok tertentu. Dalam konteks ini, literasi digital yang komprehensif tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan mengelola emosi, memahami konteks, serta menjunjung etika komunikasi. Individu dengan tingkat literasi digital yang baik cenderung lebih rasional, tidak mudah terprovokasi, dan mampu menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang konstruktif.

Integrasi literasi digital dengan literasi kewarganegaraan juga memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan persatuan nasional. Dengan demikian, literasi digital dapat dipahami sebagai instrumen ketahanan sosial yang berperan dalam mereduksi polarisasi sekaligus mendorong terciptanya ruang publik digital yang lebih inklusif dan harmonis.

Tabel 1 berikut memberikan ringkasan dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai Literasi Digital, Konflik SARA, Disinformasi, Media Sosial:

Tiara Kharisma (2017)	Kualitatif (IPA)	Konflik SARA dalam grup WhatsApp selama Pilkada DKI Jakarta 2017 terjadi karena pesan yang disampaikan tidak berangkat dari kesamaan tujuan pembentukan grup, melainkan dari kepentingan identitas agama/politik tertentu. Pengelolaan konflik dilakukan melalui kompromi atau penghindaran, dan peran penengah (cultural broker) menjadi faktor penting dalam meredakan konflik.
Sri et al. (2023)	Kuantitatif Deskriptif	literasi digital sangat penting untuk membangun masyarakat yang kritis, adaptif, dan tidak rentan terhadap informasi palsu, serta perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Muh et al. (2025)	Kualitatif	komunikasi digital sering mengalami atemporalitas dan overload informasi, yang menimbulkan kebingungan dan salah tafsir dalam komunikasi antarbudaya. Solusi utamanya adalah penguatan literasi digital,

Tiara Kharisma (2017)	Kualitatif (IPA)	<p>Konflik SARA dalam grup WhatsApp selama Pilkada DKI Jakarta 2017 terjadi karena pesan yang disampaikan tidak berangkat dari kesamaan tujuan pembentukan grup, melainkan dari kepentingan identitas agama/politik tertentu.</p> <p>Pengelolaan konflik dilakukan melalui kompromi atau penghindaran, dan peran penengah (cultural broker) menjadi faktor penting dalam meredakan konflik.</p>
Sri et al. (2023)	Kuantitatif Deskriptif	<p>literasi digital sangat penting untuk membangun masyarakat yang kritis, adaptif, dan tidak rentan terhadap informasi palsu, serta perlu dilakukan secara berkelanjutan.</p>
Muh et al. (2025)	Kualitatif	<p>komunikasi digital sering mengalami atemporalitas dan overload informasi, yang menimbulkan kebingungan dan salah tafsir dalam komunikasi antarbudaya. Solusi utamanya adalah penguatan literasi digital,</p>

		verifikasi informasi, dan kesadaran budaya.
Najib et al. (2024)	Studi Literatur (Kualitatif)	Media sosial memiliki potensi besar untuk menjaga persatuan bangsa, tetapi juga dapat memicu konflik SARA jika disalahgunakan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus disertai literasi digital dan strategi 5D2C agar konflik dapat diminimalisasi.

- **Pengelolaan komunikasi dalam komunitas digital**

Dalam grup komunikasi digital seperti WhatsApp, perlu adanya aturan komunikasi yang jelas mengenai topik diskusi dan etika penyampaian pendapat. Hal ini penting untuk mencegah konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan politik atau identitas agama, seperti yang terlihat pada dinamika komunikasi selama Pilkada DKI Jakarta 2017. Penetapan tujuan grup dan kesepakatan bersama dapat membantu menjaga komunikasi tetap kondusif.

- **Peran moderator atau penengah konflik (cultural broker)**

Kehadiran individu yang berperan sebagai penengah atau moderator dalam komunitas digital sangat penting untuk meredakan konflik. Penengah dapat membantu mengklarifikasi informasi, menenangkan situasi, serta mendorong dialog yang lebih rasional ketika terjadi perdebatan yang berpotensi memicu konflik.

- **Penggunaan strategi komunikasi digital yang bertanggung jawab**

Pengguna media sosial perlu menerapkan strategi komunikasi yang lebih bijak, seperti melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkan pesan, mempertimbangkan dampak sosial dari pesan yang dibagikan, serta menghargai keberagaman budaya dan identitas dalam masyarakat.

- **Pemanfaatan media sosial untuk memperkuat persatuan**

Media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat nilai toleransi dan kebersamaan dalam masyarakat multikultural. Pembelajaran dari mediatisasi konflik dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab agar tidak memperkuat polarisasi sosial, melainkan mendukung terciptanya komunikasi yang lebih inklusif dan harmonis.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur mengenai literasi digital sebagai upaya untuk meredakan konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), dapat ditegaskan bahwa permasalahan identitas di dunia maya tidak timbul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh tingkat literasi digital yang rendah, menyebarnya informasi yang salah, ujaran kebencian, serta polarisasi yang semakin diperkuat oleh media sosial. Sifat media digital yang cepat, luas, dan tidak terikat waktu meningkatkan kemungkinan konflik untuk melampaui batasan ruang dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital memiliki fungsi penting dalam mengurangi konflik SARA, terutama melalui tiga aspek utama, yaitu aspek kognitif (kemampuan untuk berpikir kritis dan memverifikasi informasi), aspek etis (kesadaran akan tanggung jawab serta etika dalam berkomunikasi), dan aspek sosial (penguatan toleransi serta dialog antaridentitas). Individu yang memiliki literasi digital yang tinggi cenderung bersikap lebih rasional, tidak mudah terpengaruh, dan mampu menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi yang positif.

Selain itu, menggabungkan literasi digital dengan pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi tantangan polarisasi di era digital. Dengan demikian, literasi digital dapat berfungsi sebagai alat pencegahan dan perubahan dalam menjaga kesatuan sosial, memperkuat persatuan bangsa, serta menciptakan ruang publik digital yang lebih inklusif dan harmonis.

Saran

- Literasi digital perlu diintegrasikan secara berkelanjutan dalam pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, dengan menekankan kemampuan berpikir kritis, verifikasi informasi, dan etika komunikasi digital.
- Komunitas digital perlu memiliki aturan komunikasi yang jelas serta menghadirkan moderator atau penengah untuk mencegah dan meredam konflik.
- Pengguna media sosial diharapkan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, serta menjadikan media digital sebagai sarana memperkuat toleransi dan persatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhri, M. N., Zakiah, F. N., & Novia, L. (2025). Literasi digital dan kesadaran budaya sebagai solusi tantangan atemporalitas dalam komunikasi antarbudaya. *Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam*, 3(1), 89-102.
- Maryani, E., Rahmawan, D., & Garnesia, I. (2019). Mediatisasi konflik "SARA" di media online Indonesia. *Jurnal Aspikom*, 4 (1), 184-199.
- Najib, M., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). Peranan Penggunaan Media Sosial Untuk Meminimalisasi Konflik Isu Sara Di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 127-136.
- Pristiani, YD, Widodo, A., & Sasmita, W. (2023, Juli). Pengaruh literasi digital dan literasi kewarganegaraan terhadap keterampilan penyelesaian konflik siswa. Dalam *ICLSSE 2023: Prosiding Konferensi Internasional ke-5 tentang Hukum, Ilmu Sosial dan Pendidikan*, ICLSSE 2023, 1 Juni 2023, Singaraja, Bali, Indonesia (hlm. 199). Aliansi Eropa untuk Inovasi.
- Rahayu, S., Meirawan, D., Sukadi, S., Ghinaya, Z., & Sabitri, Z. (2023). Peningkatan kesadaran kritis melawan berita palsu dan ujaran kebencian melalui literasi digital. *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 292-301.